

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam Negara demokrasi rakyat memiliki kedaulatan dilaksanakan untuk memastikan siapa yang pantas menjadi pemimpin untuk negara Indonesia. Partai merupakan organisasi yang mewakili rakyat dan sarana peran masyarakat untuk berpartisipasi.

Salah satu persyaratan sistem demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di badan legislatif maupun yang menjadi kepala eksekutif. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu ditandai dengan 3 (tiga) syarat yakni: adanya kompetisi dalam memper-ebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik (Budiardjo, 2008, hal. 139).

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu

langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terahir pengesahan dan pelantikan (Budiardjo, 2008, hal. 142).

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik” (Topatimasang, 2011, hal. 92).

Kampanye merupakan salah satu cara partai politik untuk memberitahu kepada masyarakat untuk para calon legislatif dan calon eksekutif

mereka. Setiap partai politik tentunya memiliki beragam cara atau strategi untuk komunikasi politik mereka. Termasuk juga partai Gerindra yang memiliki strategi untuk komunikasi politik kepada masyarakat dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan anak cabang (PAC). Strategi ini tentunya untuk mendapatkan suara ataupun partisipasi masyarakat kepada partai politik serta calon legislatif dan calon eksekutifnya.

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan dalam posisinya sebagai warganegara, dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik atau wakil rakyat. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan wakil rakyatnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa), pengaruh lingkungan sosial politik langsung (keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan), pengaruh faktor kepribadian, dan pengaruh faktor lingkungan sosial politik berupa situasi keadaan lingkungan pemilih (Zainal & Sarwoprasodjo, 2018).

Partai politik tentunya memiliki kepengurusan dari pimpinan pusat sampai pada tingkatan anak cabang (kecamatan). Salah satunya adalah partai Gerindra. Partai politik Gerindra memiliki kepengurusan sampai tingkatan PAC (pengurus anak cabang) yang berada juga di kecamatan Cibarusah. Pada pemilu 2019 lalu ketua umum partai politik Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Walaupun kalah dalam pemilihan presiden, partai politik Gerindra masih memiliki kader yang berjuang untuk mendapatkan suara di lembaga legislatif.

Cibarusah merupakan daerah pemilihan 1 di Kabupaten Bekasi, pada tahun 2019 lalu kader Partai Gerindra yaitu BN. Holik, Anden, dan Bodin mencalonkan diri sebagai legisltaif (DPRD) dan berada pada Daerah pemilihan Cibarusah. Ketiga calon tersebut menang dalam pemilihan legislatif di dapil 1 kabupaten Bekasi (Cibarusah, Cikarang Pusat, dan Bojomangu) (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Kemenangan ini tentunya dibantu oleh para pengurus anak cabang disetiap Kecamatannya termasuk Kecamatan Cibarusah (PAC Cibarusah) sebagaimana pada gambar berikut:

Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 300/PL.01.9-Rpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019
PEMETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BEKASI 1 (SATU)
KABUPATEN/KOTA* : KABUPATEN BEKASI
PROVINSI : JAWA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	H. M. BN. HOLIK, S.E., M.Si	15.307	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. ANDEN, S.E	10.279	2
3	PARTAI GERINDRA	5	H. BODIN	9.868	3
4	PDI PERJUANGAN	4	ADE KUSWARA KUNANG, S.H	15.338	1
5	PDI PERJUANGAN	3	SAMUEL MARULI HABAHAHAN	14.271	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. SUNANDAR, S.E	10.794	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	BUDIYANTO, S.Pi	9.717	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	FATMAH HANUM, S.Pd.I	8.489	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. CECEP NOOR	7.592	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	EDI JUNAEDI	8.342	1

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Agustus 2019

Gambar 1.1 Daftar Calon Terpilih DPRD Kab. Bekasi Dapil 1

Partai Gerindra dalam merekrut calon legislatif yang ingin berjuang dalam pemilihan umum di DPRD Kabupaten Bekasi melakukan strategi politik untuk bisa menang pada dapil tersebut. Pihak PAC Cibusah memberitahukan bahwa dalam perekrutan calon legislatif tentunya para calon harus bersilaturahmi kepada PAC, sehingga PAC bisa membantu dalam komunikasi politik kepada masyarakat agar calonnya ini bisa menang dalam pemilu.

Terbukti pada pemilu tahun 2019, tiga kader partai politik Gerindra terpilih sebagai anggota legislatif Kabupaten Bekasi. Hal ini tentunya menarik untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Gerindra khususnya di PAC Gerindra kecamatan Cibusah.

Adapun Peneliti tertarik dengan masalah ini maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Mengenalkan Calon Legislatif Kepada Masyarakat (Penelitian di Pengurus Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Cibusah).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah. Maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi partai politik Gerindra PAC Cibusah dalam mengenalkan calon legislatif kepada masyarakat pada Pemilu 2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Gerindra PAC Cibusah dalam melakukan strategi komunikasi partai politik pada pemilu 2019?

3. Bagaimana evaluasi partai politik Gerindra PAC Cibusah terhadap strategi komunikasi politik pemilu 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan juga rumusan masalah. Maka peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi partai politik Gerindra PAC Cibusah dalam mengenalkan Calon legislatif kepada masyarakat pada Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Gerindra di Cibusah dalam melakukan strategi komunikasi partai politik pada pemilu 2019
3. Untuk mengetahui evaluasi partai politik Gerindra PAC Cibusah terhadap strategi komunikasi politik pemilu 2019

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penelitian ini ada manfaat secara akademis kemudian manfaat secara praktis:

1. Manfaat Secara Akademis

Manfaat secara akademis peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan penelitan selanjutnya, dan juga bisa bermanfaat bagi para civitas akademik dalam penelitian. Kemudian manfaat dalam teoritisnya diharapkan memberikan manfaat dalam kajian komunikasi politik dengan menghubungkan teori-teori diluar ilmu politik.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis pada penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa menjadikan bahan acuan untuk partai politik Gerindra dalam melakukan komunikasi partai politik kepada masyarakat dalam mengenalkan calon legislatif yang akan mereka usung dalam pemilu.

1.5. Kerangka Pemikiran

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia atau the good life*. Maksud dari istilah itu dikarenakan sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber (Budiardjo, 2008:14).

Negara Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem presidential. Sistem presidential merupakan Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif meskipun kebijakan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif (Anggara, 2013:48).

Sedangkan sistem politik yang digunakan Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR, 2018).

Berdasarkan pemaparan pada paragraf sebelumnya diketahui bahwa negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Kemudian kedaulatan rakyat ini tentunya ada yang mewakili rakyat, yang mewakili rakyat di Negara Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini dipilih melalui pemilihan umum yang LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) JURDIL (jujur, dan adil).

Para calon legislatif ini biasanya diusung dari partai politik sebagai kendaraan mereka untuk bisa maju sebagai perwakilan rakyat. Setiap calon tentunya melakukan komunikasi politik kepada rakyat atau masyarakat bahwa mereka ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kemudian dalam komunikasi kepada masyarakat, para calon legislatif ini tentunya dibantu oleh partai politik untuk mengenalkan diri mereka ini.

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya (Anggara, 2013:91).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menggunakan teori komunikasi yang dihubungkan dengan partai politik. Teori komunikasi yang digunakan adalah teori AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action*). Pertama, Kesadaran (*awareness*) adalah langkah pertama yang harus dibuat seseorang pemasaran atau penyuluhan kepada khalayak yang menjadi target sasaran (Cangara, 2013:78). Dalam hal ini partai politik memasarkan atau mengenalkan calon legislatif kepada masyarakat agar timbul kesadarannya akan ide, gagasan, dan program yang akan dibuat oleh calon legislatif dan partai politiknya.

Kedua, perhatian (*interest*) ialah munculnya minat target sasaran (khalayak) untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh pemasar. Perhatian ini bisa saja muncul karena apa yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang baru-baru belum pernah lihat sebelumnya (Cangara, 2013 :78). Dalam hal ini partai politik membuat perhatian masyarakat bahwa ide, gagasan, dan program yang akan dibuat oleh calon legislatif dan partai politik merupakan hal yang menarik dan baru serta menuju perubahan sosial masyarakat.

Ketiga, keinginan (*desire*) adalah proses yang terjadi setelah timbul perhatian calon pembeli atau target sasaran pada barang yang ditawarkan

(Cangara, 2013:78). Dalam hal ini proses yang telah dilakukan dari kesadaran dan perhatian dari masyarakat terhadap calon legislatif dengan gagasan, ide, dan program yang akan dilakukannya membuat masyarakat ingin memilih calon legislatif tersebut.

Keempat, keputusan (*decision*) adalah tindakan yang dilakukan oleh calon pembeli dalam bentuk eksekusi, yakni memutuskan untuk memiliki barang yang ditawarkan tadi setelah menimbangkan manfaat serta melihat kemungkinan dana yang tersedia. Disini pengambilan keputusan secara tunggal dilakukan oleh calon pembeli (Cangara, 2013:78). Dalam hal ini pemilih atau masyarakat melakukan keputusan untuk memilih calon legislatif atau partai politik itu dengan pertimbangan yang telah disampaikan oleh partai politik (komunikator). Serta partai politik harus mengetahui juga keputusan yang akan diambil oleh masyarakat setelah mengenalkan atau memasarkan calon legislatif mereka.

Kelima, Tindakan (*action*) adalah perlakuan yang dibuat oleh pembeli setelah memiliki barang itu dalam bentuk sisi (Cangara, 2013:78). Tindakan dalam hal penelitian ini adalah tindakan masyarakat saat setelah memilih calon legislatif yang telah dikenal oleh partai politik.

Berdasarkan teori komunikasi model AIDDA kemudian peneliti menghubungkannya dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan strategi tidak hanya

berfungsi sebagai peta yang menunjukkan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian juga dengan strategi komunikasi yang merupakan panduan perencanaan komunikasi yang telah ditentukan.

Sebuah perencanaan atau strategi tidak terpisahkan dengan pengelolaan atau manajemen secara keseluruhan, yaitu ketika faktornya menjalankan fungsinya baik dari segi proses, obyek, maupun komponennya. Dalam hal ini bisa dirumuskan dengan rumusan POAC (Siagian, 2003). POAC ini merupakan singkatan dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Berikut penjelasannya dibawah ini:

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning adalah mendefinisikan tujuan dari sebuah organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam sebuah organisasi (Siagian, 2003:45). Dalam penelitian ini perencanaan yang dimaksud adalah rencana dari partai politik Gerindra dalam mengenalkan calon legislatif kepada masyarakat yang diusung oleh partai mereka. Dimulai dari perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungan (Siagian, 2003:45). Pada tahapan pengorganisasian untuk penelitian ini

adalah pengorganisasian yang dilakukan oleh partai politik Gerindra pada kerangka kerja mengenalkan calon legislatif kepada masyarakat Cibarusah.

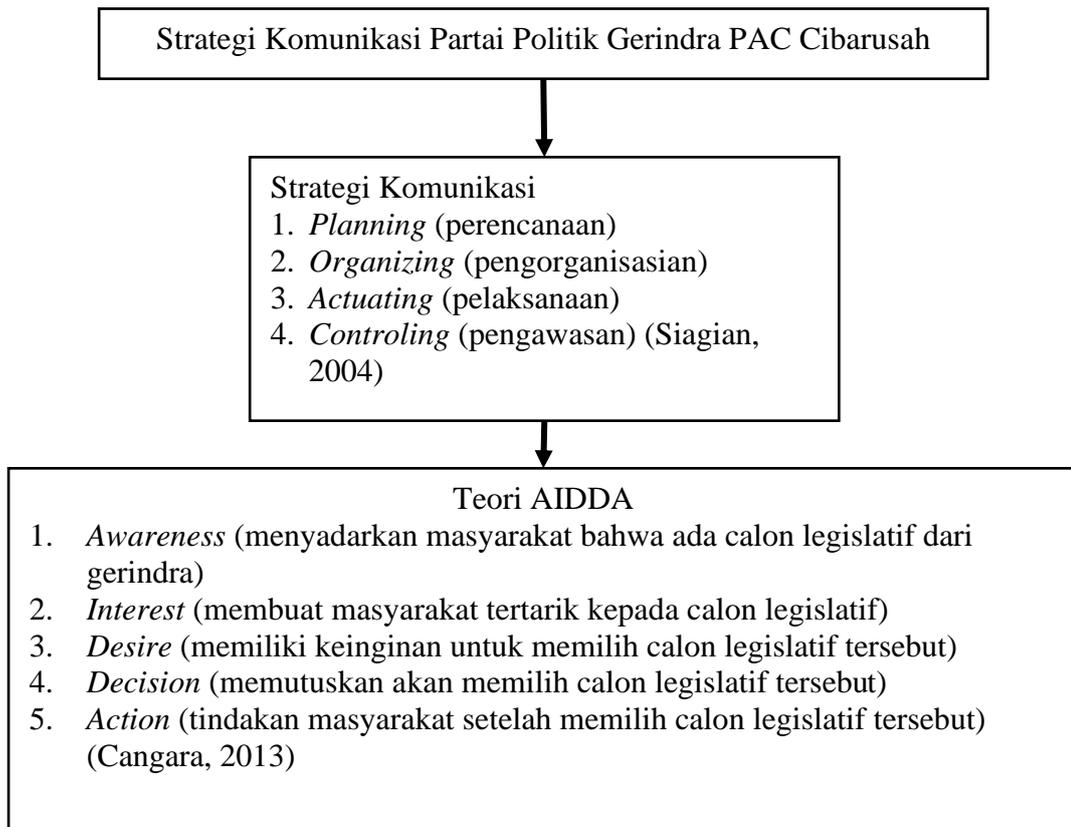
3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan organisasi bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan (Siagian, 2003:45). Pada tahapan ini tindakan yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengenalkan calon legislatif sebagaimana yang telah direncanakan dan diorganisasikan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Pada tahapan yang terakhir adalah pengawasan yang dilakukan oleh partai politik kepada petugas-petugasnya apakah sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pemaparan kerangka pemikiran di atas. Maka peneliti membuat sebuah bagan kerangka pemikiran agar memudahkan alur pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.6. Permasalahan Utama

Partai Gerindra selalu menang dalam legislatif, sedangkan pada tataran eksekutif mereka kalah. Pada tataran eksekutif yaitu pada pemilihan presiden mereka. Tetapi mereka menang dalam wilayah legislatif di Dapil Cibarusah. Maka dari itu permasalahan utama pada penelitian ini adalah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra PAC Cibarusah yang akan diteliti.